

ANALISIS JURNAL

Oleh : Nurul Sagita
Mahasiswi PGSD FKIP Unila 2024

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Politik
2. Volume : 16
3. Nomor : 1
4. Halaman : 1-110
5. Tahun Penerbit : ISSN: 0852-0976
6. Judul Jurnal : Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
7. Nama Penulis : Efriza, dkk.

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : 1 Paragraf
2. Halaman : Setengah Halaman
3. Ukuran Spasi : 1.0
4. Uraian Abstrak : Tulisan ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. . Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

5. *Keyword Jurnal : Deepening Democracy, Presidetal Election, Politicization of Identity, Effective Government, Trust Building.*

C. PENDAHULUAN JURNAL

Pada pendahuluan jurnal, penulis menyampaikan bahwa Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, *head to head*, untuk memperebutkan kursi presiden. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, “Bagaimana dampak pilpres yang telah digelar beberapa kali terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi?

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan di dalam pembahasan, *point* pentingnya, yaitu: Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilpres langsung di Indonesia, meskipun merupakan bentuk dari demokrasi prosedural, belum sepenuhnya menghasilkan demokrasi yang substantif. Sejak diberlakukannya pemilu presiden secara langsung tahun 2004 hingga Pemilu 2019, proses demokratisasi memang menunjukkan kemajuan secara institusional, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas demokrasi itu sendiri.

Beberapa temuan utama dalam studi ini mencakup:

1. Proses Konsolidasi Demokrasi Masih Belum Tuntas: Konsolidasi demokrasi belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kecenderungan kompromi kepentingan antara elite politik, serta lemahnya pelembagaan demokratis baik di level negara maupun masyarakat.
2. Dominasi Demokrasi Prosedural: Demokrasi yang berlangsung cenderung lebih menekankan pada aspek prosedural seperti jumlah pemilih, pelaksanaan kampanye, dan pemenuhan syarat administratif. Namun

kualitas partisipasi, kompetisi yang sehat, serta penghormatan terhadap hak sipil masih belum optimal.

3. Tingginya Polarisasi dan Kegaduhan Politik: Pemilu 2019 menunjukkan tingginya eskalasi konflik horizontal akibat kampanye yang sarat dengan hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi agama. Hal ini mengindikasikan lemahnya kontrol sosial serta rendahnya kualitas komunikasi politik di ruang publik.
4. Ketimpangan Substansi Demokrasi: Terdapat ketidaksesuaian antara harapan akan demokrasi yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan rakyat dengan praktik politik yang masih didominasi oleh mobilisasi elite dan patronase.
5. Partisipasi Masyarakat Masih Bersifat Dangkal: Meskipun secara kuantitatif partisipasi pemilih meningkat, namun dari segi kualitas partisipasi masih terjebak dalam praktik vote buying, mobilisasi simbolik, dan belum banyak menyentuh level pengambilan keputusan.

Jurnal ini menyoroti pentingnya membedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural di Indonesia telah berkembang pesat melalui mekanisme pemilu langsung, partisipasi elektoral, dan kebebasan formal. Namun demikian, substansi demokrasi yang menyentuh pada keadilan sosial, efektivitas pemerintahan, dan partisipasi publik yang bermakna masih sangat terbatas.

Hal ini sejalan dengan teori deepening democracy, di mana pendalaman demokrasi tidak hanya memerlukan reformasi institusi politik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat dalam kontrol sosial dan keterlibatan aktif dalam pengawasan pemerintahan. Dalam konteks ini, pilpres bukan sekadar pesta demokrasi, melainkan seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan pemerintahan yang legitimate, efektif, dan akuntabel. Tingginya tensi politik

pada Pemilu 2019 yang diwarnai oleh hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi agama menjadi indikator lemahnya penguatan nilai-nilai demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih belum mapan dan sangat rentan terhadap polarisasi elite.

Budaya politik patrimonial, kecenderungan feodalisme, serta minimnya edukasi politik warga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dari negara dan masyarakat dalam memperkuat pendidikan politik, memperluas akses informasi yang kredibel, serta membangun budaya demokratis yang menghargai pluralitas dan hak asasi manusia.

E. KESIMPULAN

Di kesimpulan penulis menguraikan kesimpulannya yang objektif secara pribadi dengan melihat subjek yang telah diamati. Berikut uraian Kesimpulan penulis :

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara *regular* karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, *civil society*, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk *suksesi* kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitnya dan *stakeholders* terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung *constraining* dan tidak *concern* dengan nilai-nilai demokrasi

substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi *genuine* masyarakat, kualitas kompetisi, *political equality*, dan peningkatan *political responsiveness*.

F. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

1. Kelebihan

Secara keseluruhan jurnal memiliki kelebihan yang menonjol, jika dilihat dari abstraknya penulis sudah menggunakan abstrak dengan format Bahasa Inggris hal ini yang mendukung jurnal ini berpotensi menjadi rujukan secara internasional. Kelebihan yang lain adalah Jurnal ini memuat banyak referensi akademik dari tokoh-tokoh penting seperti Laurence Whitehead, Migdal, Reuschmeyer, Smith, dan Arghiros, yang memperkuat argumen ilmiah mengenai konsolidasi demokrasi dan demokrasi substantif, serta jurnal ini menyajikan data konkret seperti jumlah laporan kecurangan ke Bawaslu, jumlah kasus hoaks dan ujaran kebencian, serta kutipan dari pejabat negara dan laporan media. Hal ini meningkatkan validitas analisis empiris.

2. Kekurangan

Terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini tentunya ada kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini yaitu, Meskipun aktual, banyak kutipan berasal dari media berita (Republika, Detik, CNN Indonesia) ketimbang jurnal akademik atau hasil penelitian lapangan. Ini bisa dianggap melemahkan akademisitas di mata reviewer yang ketat.